

ABSTRAK

Tesis dengan judul “Implementasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Terhadap Proses Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Di Polres Rembang”. Berdasarkan uraian dalam Tesis ini, permasalahan yang akan yang akan di teliti adalah: 1) Bagaimana Implementasi berlakunya UU RI Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan apakah dapat mengoptimalkan terhadap penyidikan / penanganan tindak pidana korupsi di Satreskrim Polres Rembang ? 2) Kendala-kendala apa yang dihadapi oleh penyidik dalam pelaksanaan Penyidikan tindak pidana korupsi di Satreskrim Polres Rembang setelah berlakunya UURI Nomor 30 tahun 2014 ? 3) Bagaimana solusi terhadap kendala penyidik dalam menangani tindak pidana korupsi di Satreskrim Polres Rembang setelah berlakunya UURI Nomor 30 tahun 2014 ?

Tujuan penelitian dalam penelitian ini : 1) Mendeskripsikan studi kasus tindak pidana korupsi sejak berlakunya UURI Nomor 30 tahun 2014 studi kasus di Satreskrim Polres Rembang. 2) Menganalisis kendala-kendala yang dihadapi oleh penyidik satreskrim Polres Rembang dalam penanganan tindak pidana korupsi sejak berlakunya UURI Nomor 30 tahun 2014 studi kasus di Polres Rembang. 3) Menganalisis solusi terhadap kendala penanganan tindak pidana korupsi di satreskrim Polres Rembang setelah berlakunya UURI Nomor 30 tahun 2014.

Analisis teori : 1) Teori Kepastian Hukum yitu kepastian hukum secara normatif dan mengatur secara jelas dan logis tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) 2).Keadialn Hukum bahwa hukum berlaku untuk umum dan harus sesuai dengan cita cita keadilan dalam masyarakat.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa : 1). Hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Penyidik Polres Rembang terkait dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab. Rembang ditindak lanjuti dengan pengembalian keuangan atas kekurangan volume ke Kas Daerah Kab. Rembang oleh pelaksana pekerjaan sudah mengembalikan keuangan ke Kas Daerah Kab. Rembang atas kekurangan volume tersebut. Berdasarkan Surat Telegram dari Kapolda Jateng ST / 2386 / VIII / 2016 Tanggal 19 Agustus 2016 ditekankan hal sebagai berikut **“JIKA DLM PROSES LIDIK ADA PENGAMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA KE KAS NEGARA AGAR LIDIK TDK DITINGKATKAN KE TINGKAT SIDIK”** karena dalam perkara ini kerugian negara sudah dikembalikan ke Kas Negara / Daerah maka perkara ini tidak ditingkatkan ke Proses Penyidikan dan penyelidikan dihentikan. 2) Pemberian diskresi kepada pemerintah atau administrasi negara merupakan konsekuensi logis dari konsepsi *welfare state* yang mengesampingkan peran asas legalitas. 3) Permasalahan mengenai penyalahgunaan diskresi yang melampaui batasannya hendaknya diberikan rumusan mengenai sanksi pidana sebagai pengikatnya agar tidak terjadi kesewenang-wenangan penggunaan diskresi oleh pejabat pemerintahan yang berwenang.

Kata Kunci : Implementasi, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Penyidikan Tindak Pidana Korupsi

ABSTRACT

Thesis entitled "Implementation of Law Number 30 Year 2014 About Government Administration Against Corruption Crime Investigation Process In Resort Police". Based on the description in this Thesis, the issues that will be examined are: 1) How is the implementation of Law No. 30 of 2014 on Government Administration and is it possible to optimize the investigation / handling of corruption in Satreskrim Rembang Polres? 2) What are the constraints faced by investigators in the implementation of corruption criminal investigation in Satreskrim Polres Rembang after the enactment of UURI Number 30 of 2014? 3) How is the solution to the constraints of investigators in handling corruption in Satreskrim Rembang Polres after the enactment of UURI Number 30 of 2014?

The purpose of research in this study: 1) Describe the case study of corruption since the enactment of UURI Number 30 year 2014 case study in Satreskrim Rembang Polres. 2) Analyzing the constraints faced by the investigator satreskrim Rembang Police in handling corruption since the entry into force of UURI Number 30 of 2014 case study in Polres Rembang. 3) Analyzing the solution to the constraints handling corruption crime in Satres Polres Rembang after the enactment of UURI Number 30 of 2014.

The results concluded that: 1). The result of further investigation conducted by Rembang Police Investigator related to alleged criminal acts of corruption committed by Head of Agriculture and Forestry Office of Kab. Rembang followed up with a financial return on the lack of volume to the Regional Cash Kab. Rembang by the executor of the work and that the third party / executor of work has returned the financial to the Regional Cash Kab. Rembang over the lack of such volume. Based on the Telegram Letter from Central Java Police Department ST / 2386 / VIII / 2016 dated August 19, 2016 emphasized the following: "IF DLM LIDIC PROCESS IS THE LOSS OF FINANCIAL STATEMENTS TO CASH COUNTRY TO LIDIK TDK IMPROVED TO LEVEL SIDIK" because in this case the state loss has been returned to the State Treasury / District then this case is not upgraded to the Investigation Process and the investigation is terminated. 2) Giving discretion to the government or state administration is a logical consequence of the welfare state conception that overrides the role of the legality principle. 3) Issues concerning misuse of discretion beyond its limits should be given the formulation of criminal sanctions as binding so as to avoid arbitrary use of discretion by authorized government officials.

Keywords: Implementation, Government Administration Act, Corruption Crime Investigation